

LAMPIRAN XI :
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 31 Tahun 2022
TENTANG :
PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2023

RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Renja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis Renstra Perangkat Daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Renja Perangkat Daerah secara umum mempunyai nilai penting, antara lain digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian Pembangunan Nasional.

1. Merupakan instrument pelaksanaan Renstra PD;
2. Menjadi dokumen Rencana Kerja OPD, berupa program/kegiatan/sub kegiatan OPD;

BAB I- hal.1

3. Mewujudkan keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dan sinkronisasi pencapaian sasaran Renstra PD;
4. Digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Proses penyusunan Renja Dinas PPKB dan P3A Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2023.

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

I.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun untuk memberikan pedoman, gambaran dan arah pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Wonogiri dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas PPKB dan P3A tahun 2023 adalah :

1. Menetapkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas PPKB dan P3A tahun 2023;

2. Menyiapkan rencana Program Dinas PPKB dan P3A tahun 2023;
3. Menyiapkan rencana Kegiatan Dinas PPKB dan P3A tahun 2023;
4. Menyusun indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai, guna mencapai sasaran organisasi tahun 2023;
5. Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas PPKB dan P3A tahun 2023.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PPKB DAN P3A TAHUN 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD dan RKPD, bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, guna memastikan bahwa rumusan program, kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra perangkat daerah. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas PPKB dan P3A Tahun 2016-2021. Dalam upaya mencapai target yang ditetapkan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.231.150.156,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 12.507.536.164 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.723.613.992. Realisasi total Belanja sebesar Rp. 11.784.822.152 atau 82,81%. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 10.145.883.152 atau 81,12% dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.638.939.000 atau 95,09% Realisasi total belanja sebesar Rp.6.914.921.203 adalah 0,287% dari realisasi total Belanja Daerah tahun 2021, baik belanja Operasi maupun belanja Modal.

Anggaran Dinas PPKB dan P3A pada tahun 2021 digunakan untuk membiayai 13 (tiga belas) kegiatan pada 6 Program, dengan capaian serapan tertinggi pada Program Pemenuhan hak Anak sebesar 97,81% hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perlindungan anak sebagai hasil nyata adalah Tingkat Capaian Kabupaten Layak anak dari Pra KLA menjadi Pratama. Sedangkan untuk capaian program yang

terendah pada Program Penunjang Urusan Pemeritahan Kabupaten/Kota sebesar 75,03% hal ini dikarenakan banyaknya pegawai yang pensiun tetapi belum dapat terisi. Hasil Evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu sebagai mana dalam tabel 2.1

Tabel 2.1a
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : DINAS PPKB dan P3A											Lembar :	
Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)		
		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
		PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	58.33%	11.76	-	-	-	-	-	-	
		Advokasi Komisi Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan tentang perlindungan anak	2 Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	
		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase Pemenuhan Hak Anak	96.67%	40	-	-	-	-	-	-	
			Rasio program dan kegiatan responsif gender di SKPD Kab. Wonogiri	90%	90	-	-	-	-	-	-	
		Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah anggota tim P2TP2A yang meningkat pengetahuannya dan ketampilannya	285 orang	285	-	-	-	-	-	-	
		Advokasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Terwujudnya Program Keserasian Kebijakan Kabupaten Layak Anak	325 orang	325	-	-	-	-	-	-	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	45.74%	49.64	-	-	-	-	-	-	
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	66%	53.48	-	-	-	-	-	-	
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga parlemen	16.60%	16	-	-	-	-	-	-	
		Penguatan Kapasitas Perempuan	Jumlah peserta yang memahami peran serta perempuan dalam pembangunan	450 orang	-	-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA				-	-	-	-	-	-
	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Persentase Peserta KB Baru	23%	21.70%	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan KIE	Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru terhadap PPM	20 jenis	5	-	-	-	-	-	-
	Penguanan Kegiatan KB Kes Bhayangkara TNI Manunggal, Kesatuan Gerak PKK	Jumlah Kegiatan KB Kes Bhayangkara, TNI Manunggal, Kesatuan Gerak PKK	1 keg	0	-	-	-	-	-	-
	DAK Bidang Keluarga Berencana	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	3 Keg	3 Keg	-	-	-	-	-	-
	Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan TRIBINA Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)(DAK Non Fisik)		25 Kec	25 Kec						
	Operasional Integrasi Program KKBPK di Kampung KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)(DAK Non Fisik)		25 Kec	25 Kec						
	Operasional Penyuluhan Keluarga Berencana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)		25 Kec	25 Kec						
	Distribusi Alokon Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)		46 Klinik	46 Klinik						
	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Persentase PUS yang Kurang dari 20 tahun	0.255	0.193	-	-	-	-	-	-
	Orientasi KRR bagi konselor sebaya dan organisasi pemuda dan siswa sekolah dan Operasional BP4	Jumlah peserta yang memahami Kesehatan Reproduksi	1667 orang dan 21 Tahun	1667 orang dan 21 Tahun	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Cakupan Peserta KB Aktif MKJP	21%	27.26	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan konseling KB	Jumlah pelayanan konseling KB	225 Orang	8 orang	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	80%	85.93	-	-	-	-	-	-
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	81%	87.67	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pemberian Bantuan Operasional TRI BINA	Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR, dan BKL yang mendapatkan pembinaan	75 Orang	0 Orang	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pemilihan Kelompok Kegiatan/Institusi Masyarakat Terbaik dan Temu Kader, IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana	Jumlah pelaksanaan pemilihan kelompok Institusi Masyarakat Terbaik dan Temu Kader, IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana	42 Kelompok dan 1 Keg	42 Kelompok dan 1 Keg	-	-	-	-	-	-
	Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah dokumen pemutakhiran data keluarga	294 Desa	294 Desa	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD									
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan						
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan						
	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan	12 bulan						
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	105 Buah	105 Buah						
	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan						
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama satu tahun	12 bulan	12 bulan						
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun	12 bulan	12 bulan						
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan						
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah selama satu tahun	12 bulan	12 bulan						
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah selama satu tahun	12 bulan	12 bulan						
	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	Jumlah Pengajuan Honor Tenaga Kerja Non Pegawai	12 bulan	12 bulan						
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 bulan						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dalam satu tahun	8 unit	8 unit						
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	10 jenis	10 jenis						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 jenis	1 jenis						
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	0	0						
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		49 orang	0 orang						
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7 dokumen	7 dokumen						
	Peningkatan Kinerja Perencanaan, Pelaporan dan Monitoring Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	7 Buku	7 Buku						
	Peningkatan Kinerja Keuangan	Jumlah dokumen laporan kinerja Keuangan tepat waktu	12 bulan	12 bulan						

Tabel 2.1b
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Wonogiri

										Lembar :	
Nama Perangkat Daerah : DINAS PPKB dan P3A											
Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT	0.029	-	-	-	-	0.0063	0.0063	21.72
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	1725	-	-	-	-	345	345	20.00
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Berperan aktif	10	-	-	-	-	6	6	60.00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	37.93	-	-	-	-	32.75	32.75	86.34
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan data Gender dan Anak	37.93	-	-	-	-	26.41	26.41	69.63
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	25	-	-	-	-	20	20	80.00
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA	56	-	-	-	-	50	50	89.29

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2022
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	500	-	100	100	100	100	200	40.00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	500	-	100	100	100	100	200	40.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	500	-	100	100	100	100	200	40.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	500	-	100	100	100	100	200	40.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	500	-	100	100	100	100	200	40.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	500	-	100	100	100	100	200	40.00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility rate (TFR)	9.9	-	2	2	100	2	4	40.40
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan	20	-	4	4	100	4	8	40.00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peningkatan peserta KB aktif	393.28	-	100	100	100	77.91	177.91	45.24
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	125	-	25	25	100	25	50	40.00
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan KB di Daerah	500	-	100	100	100	100	200	40.00
		PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	425	-	100	100	100	85	185	43.53
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	425	-	100	100	100	85	185	43.53

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pada tahun 2021 capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) mencapai target dari yang diperjanjikan Capaian kinerja pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tahun 2021, realisasi Indikator Kinerja dan Perkiraan Capaian Tahun 2021 serta Proyeksi Tahun 2021, secara lebih lengkap dapat dilihat pada table 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKB dan P3A
Kabupaten Wonogiri

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	-	Percentase ARG pada belanja langsung APBD	4.35	-	-	-	4.35	-	-	-	
			Percentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.0065	-	-	-	0.0065	-	-	-	
2	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	-	TFR (Angka Kelahiran Total)	1.62	2	1.99	1.98	1.62	-	1.99	1.98	
			Rasio Akseptor KB / Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	77.50	78.32	78.85	79.00	77.4	77.61	78.85	79.00	
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	9.43	8.47	8.12	7.59	7.89	7.82	8.12	7.59	

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2016 tersebut Tugas Dinas PPKB dan P3A adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pemberian layanan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Pelayanan Keluarga Berencana;
2. Pemberian layanan Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi;
3. Pemberian layanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Pembentukan Kampung KB;
4. Pemberian layanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Pemberdayaan Keluarga;
5. Pemberian layanan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
6. Pemberian layanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
7. Mengkoordinasikan layanan Pemenuhan Hak Anak.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sampai dengan akhir tahun 2020, terdapat beberapa capaian kinerja yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. GAP antara rencana dengan realisasi menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi di Dinas PPKB dan P3A.

Tabel 2.3
Permasalahan Yang Dihadapi Dinas PPKB dan P3A

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlindungan Perempuan dan Anak yang belum Optimal	Belum optimalnya Pemenuhan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	<p>Perlu peningkatan Pemahaman korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk berani melapor</p> <p>Perlu peningkatan pengembangan lembaga penyedia pelayanan kualitas keluarga</p> <p>-Perlu Peningkatan pelaksanaan Komunikasi,Informasi dan Edukasi Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak bagi Keluarga</p>
	Belum optimalnya tingkat capaian Kabupaten Layak Anak	<p>Perlu meningkatkan Koordinasi dan komunikasi lintas sektoral dalam pencapaian Kabupaten Layak Anak yang optimal .</p> <p>Perlu Advokasi Kebijakan dan Peningkatan pendampingan pemenuhan hak anak pada lintas setor.</p>
Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk	Masih rendahnya Rasio Akseptor KB	<p>Perlu peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi terhadap program Bangga Kencana</p> <p>Perlu Peningkatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP)</p> <p>Perlu Peningkatan Kopentensi tenaga pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi remaja</p> <p>Perlu peningkatan kesertaan KB Pria</p> <p>Perlu Peningkatan pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB</p> <p>Perlu peningkatan sarana penunjang pelayanan KB</p>
	Masih tingginya Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi	<p>Perlu Peningkatan pembagunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Perlu Peningkatan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>Perlu peningkatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.</p>

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang sangat penting bagi perangkat daerah :

1. Isu Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Isu Strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah; Masih rendahnya perlindungan Perempuan dan Anak karena lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.
2. Isu Strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Isu Strategis pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah; Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi karena belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), cukup tingginya pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terlayani.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan RKPD tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke-2 dari RPJMD kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah dan digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD 2023 ada beberapa Sub kegiatan yang direfoksing. Dan untuk sub Kegiatan dari anggaran DAK fisik dan Non fisik dikeluarkan dari pagu dikarenakan belum ada perkiraan pagu DAK hal ini dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah: Dinas PPKB dan P3A

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD (Hasil Analisis Kebutuhan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15,005,842,977	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4,164,574,448
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				171,519,969	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					150,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Rasio KDRT	0.0061 Persen	95,274,714	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Rasio KDRT	0.0061 Persen	75,000,000	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	345 Orang	85,484,714	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	345 Orang	70,000,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Berperan aktif	10 Unit	9,790,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Berperan aktif	10 Unit	5,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Percentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	37.93 Persen	9,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Percentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	37.93 Persen	25,000,000	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Percentase Ketersediaan data Gender dan Anak	37.93 Persen	9,000,000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Percentase Ketersediaan data Gender dan Anak	37.93 Persen	25,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Percentase Pemenuhan Hak Anak	25 Persen	67,245,255	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Percentase Pemenuhan Hak Anak	25 Persen	50,000,000	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Percentase lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA	56 %	67,245,255	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Percentase lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA	56 %	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD (Hasil Analisis Kebutuhan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				14,834,323,008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4,014,574,448
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	5,516,986,998	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	3,923,574,448	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 persen	8,999,630	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 persen	22,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100 persen	4,082,871,797	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100 persen	2,723,586,048	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100 persen	100,407,723	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100 persen	87,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1,253,731,727	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1,050,988,400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	70,976,121	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	40,000,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Total Fertility rate (TFR)	1,99 Angka	41,619,398	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Total Fertility rate (TFR)	1,99 Angka	20,000,000	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan	4 Lembaga	41,619,398	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan	4 Lembaga	20,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD (Hasil Analisis Kebutuhan)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase peningkatan peserta KB aktif	78,32 Persen	8,359,302,093	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase peningkatan peserta KB aktif	78,32 Persen	53,000,000	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPK	25 Lokasi	2,068,089,124	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	1 Dokumen	7,000,000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD	2664 Orang	1,411,200,000	-	-	-	-	-	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelayanan KB di Daerah	100 %	3,644,812,969	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelayanan KB di Daerah	100 %	46,000,000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangga Kencana	25 Kec	1,235,200,000	-	-	-	-	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	85 Persen	916,414,519	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	85 Persen	18,000,000	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	85 Kelompok	916,414,519	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	85 Kelompok	18,000,000	
					15,005,842,977					4,164,574,448	

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebagai tindak lanjut dari Musrenbang Kabupaten ada beberapa kegiatan yang ditujukan pada Dinas PPKB dan P3A yaitu; Pembangunan Pondok Baca Taman Literasi Dusun Josari RT 01/RW 03 dan Dusun Nailan RT 01/RW 06 Desa Jimbar Kecamatan Pracimantoro. Usulan tersebut tidak bisa diakomodir karena tidak dapat dilakukan penganggaran belanja Modal untuk Desa Melalui Dinas PPKB dan P3A.

Tabel 2.5
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2023**
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Dinas PPKB dan P3A

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tahun 2023 merupakan periode ketiga dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan agenda (Nawacita) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Renstra Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 mendukung dan berkontribusi langsung pada Pembangunan Nasional Prioritas Ketiga yaitu: ***Meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya saing*** dan keempat yaitu: ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan***. Berbagai isu strategis yang berkembang di Indonesia saat ini dan perlu medapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan strategis, serta kebijakan program/kegiatan pada renstra BKKBN 2020-2024, antara lain sebagai berikut:

1. Bonus Demografi;
2. *Aging Population*;
3. Pendekatan Siklus Hidup Berbasis Perencanaan Hidup Berkeluarga;
4. Satu Data Kependudukan;
5. Angka kematian Ibu dan bayi Masih Tinggi;
6. Penurunan Penggunaan Kontrasepsi Modern;
7. Rendahnya Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga;
8. Kebutuhan Ber-KB Pasangan Usia Subur yang Belum Terlayani (*Unmetneed*) Masih tinggi;
9. Prevalensi Stunting Masih Tinggi;

10. Rendahnya Keluarga yang Mengetahui Fungsi Keluarga;

11. Pernikahan Usia Anak.

Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan sasaran strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate(TFR)*;

2. Meningkatnya Angka Prevelensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevelence Rate (mCPR)*;

3. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio (ASFR)*;

4. Meningkatnya Indek Pembangunan Keluarga;

5. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama;

6. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak” dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);

2. Proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;

3. Prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);

4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);

5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; dan

7. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wonogiri, Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun 2023 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wonogiri yang didukung dengan Peningkatan Kualitas Hidup melalui Pengelolaan Sumber Daya secara Mandiri” dengan Prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, pelaku Usaha Mikro serta pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemiskinan kedepan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan dana BDT yang telah terverifikasi dan tervalidasi dengan sebaran pada desa/kelurahan miskin di Kabupaten Wonogiri.

2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Wonogiri, dengan cara melaksanakan Program dan kegiatan yang mendukung antara lain :

a. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas

b. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan Mewujudkan kualitas layanan rujukan.

3. Pengelolaan Potensi lokal Daerah.

Program dan kegiatan diarahkan pada Pembangunan sarana prasarana pasar tradisional agrobisnis, kemudahan akses permodalan bagi UMKM, penguatan BUMDES dan pelatihan iptek dan inovasi bagi pengusaha pemula.

4. Peningkatan Kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana.

5. Pemantapan infrastruktur sarana prasarana dasar, dengan dukungan sarana keselamatan jalan yang memadai agar tercipta rasa aman, tenang, selamat dan penyediaan air baku dan air bersih untuk solusi penanganan kekeringan.

6. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal derah.

Reformasi birokrasi diharapkan dapat diimplementasikan pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin baik, efektifitas program/kegiatan dan efisiensi anggaran. Reformasi birokrasi terhadap manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan dan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur diharapkan juga semakin baik.

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri melaksanakan 2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga program kegiatan di Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tidak secara spesifik mendukung salah satu atau beberapa program prioritas di tahun 2022, tetapi secara tidak langsung menunjang seluruh program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tersebut diatas.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan PD, tujuan Rencana Kerja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 berdasarkan Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Mewujudkan Pengendalian Penduduk.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam Rencana Kerja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak

Indikator Tujuan: Rasio Jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani.

Sasaran: Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak.

Indikator Sasaran:

- a. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan(Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu);
- b. Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak.

2. Mewujudkan Pengendalian Penduduk

Indikator Tujuan: Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk.

Sasaran: Terwujudnya Pengendalian Penduduk.

Indikator Sasaran:

- a. Rasio Akseptor KB;
- b. Cakupan PUS yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed).

III.3. Program dan Kegiatan

Dalam upaya mencapai target kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dalam periode tahun 2021-2026 ditetapkan sebanyak 7 (enam) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan, baik Program Urusan maupun Program Penunjang Urusan, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini disertai dengan pagu indikatif pendanaannya beserta rencana target yang akan dicapai pada periode 2021-2026, yang berpedoman pada proyeksi kerangka pendanaan yang ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

Nomenklatur Program dan kegiatan tahun 2021 yang disusun harus berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menggantikan nomenklatur Program dan Kegiatan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya. Mengingat dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 masih berpedoman pada Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, guna menjaga konsistensi RPJMD dengan RKPD tahun 2023, terlebih dahulu dilakukan pemetaan guna menjamin bahwa program dan kegiatan Permendagri Nomor 90 Tahun 2021 tetap bisa direncanakan di tahun 2023, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Rumusan rencana Program dan Kegiatan Dinas PPKB dan P3A Tahun 2023 yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pembangunan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota.
4. Program Pengendalian Penduduk;
 - a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal
 - c. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
 - d. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga.
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 - a. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruangan
 - b. Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
 - c. Penyediaan Sarana pendukung Operasional PKB/PLKB
 - d. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - e. Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - f. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 - g. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - h. Peningkatan Kopetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - i. Dukungan Operasional Pelayanan KB bergerak
 - j. Peningkatan Kesertaan KB Pria
 - k. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
 - a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
7. Orientasi /Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);

- a. Penyediaan Biaya Operasional Bagi kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- b. Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS);
- c. Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- d. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.

Tabel Program dan Kegiatan dan Prakiraan Maju Tahun 2024 sebagaimana pada tabel 3.3

Tabel 3.3

Unit Organisasi : 2.14.0.00.2.08.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.2.08.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									150,000,000			130,000,000		
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									75,000,000			75,000,000		
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									70,000,000			70,000,000		
2 08 04 2.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.0061 Persen	1 Dokumen	345 Orang	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio KDRT	0.0061 Persen	70,000,000		
2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang									5,000,000			5,000,000		
2 08 04 2.02 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Berperan aktif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	345 Orang	10 Lembaga	10 Unit	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	345 Orang	5,000,000		
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									25,000,000			5,000,000		
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									25,000,000			5,000,000		
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Percentase OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.93 Persen	14 dokumen	32.07 Persen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	37.93 Persen	5,000,000		
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									50,000,000			50,000,000		
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									50,000,000			50,000,000		
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Percentase lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Persen	354 Organisasi	56 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase Pemenuhan Hak Anak	25 Persen	50,000,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target															
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							4,014,574,448				5,161,769,399			
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,923,574,448				5,000,129,399			
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							22,000,000				2,000,000			
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Percentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	7 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	1,000,000		
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	12 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	1,000,000		
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,723,586,048				3,650,396,999			
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Percentase administrasi keuangan daerah yang di susun	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	19 Orang/bulan	100 %	2,722,586,048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	3,649,396,999		
2	14	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Percentase administrasi keuangan daerah yang di susun	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	1 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	1,000,000		
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							87,000,000				55,000,000			
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Percentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	4 Paket	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	20,000,000		
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Percentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	15 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	5,000,000		
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Percentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	2 Paket	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	12,000,000		
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ^{SKPD}	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Percentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	30 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	18,000,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
2	14	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,050,988,400						1,252,732,400	
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Percentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	4 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	1,000,000
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Percentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	12 Laporan	100 %	86,850,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	86,850,400
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Percentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	12 Laporan	100 %	963,138,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	1,164,882,000
2	14	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40,000,000					40,000,000		
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Percentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	127 Unit	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	35,000,000
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Percentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	4 Unit	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	2,500,000
2	14	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Percentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Wonokarto	100 Persen	7 Unit	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	2,500,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								20,000,000				20,000,000							
2	14	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka								20,000,000				20,000,000							
2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Total Fertility rate	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan	Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,99 Angka	1 Dokumen	4 Lembaga	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Total Fertility rate (TF R)	1,99 Angka	20,000,000						
2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								53,000,000			123,640,000								
2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								7,000,000			77,640,000								
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase peningkatan peserta KB aktif	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,32 Persen	1 Dokumen	25 Lokasi	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan peserta KB aktif	78,32 Persen	77,640,000					
2	14	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								46,000,000			46,000,000								
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase peningkatan peserta KB aktif	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pelayanan KB di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,32 Persen	2 Orang	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan peserta KB aktif	78,32 Persen	6,000,000					
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase peningkatan peserta KB aktif	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase Pelayanan KB di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,32 Persen	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan peserta KB aktif	78,32 Persen	10,000,000					
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Persentase peningkatan peserta KB aktif	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Persentase Pelayanan KB di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,32 Persen	13 Orang	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan peserta KB aktif	78,32 Persen	30,000,000					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						18,000,000					18,000,000					
2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						18,000,000					18,000,000					
2	14	04	2.01	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Percentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Persen	75 Orang	85 Kelompok	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	85 Persen	10,000,000				
2	14	04	2.01	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Percentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Persen	1 laporan	85 Kelompok	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	85 Persen	8,000,000				
TOTAL												4,164,574,448				5,291,769,399				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dalam Cascading Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri untuk pencapaian tujuan Tahun 2021-2026, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci kedalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

IV.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

- A. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pembangunan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.
 3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
- B. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 1. Program Pengendalian Penduduk
 - a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota;
 - b. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal;
 - c. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan;

- d. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga.
- 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB):
 - a. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruangan:
 - a. Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK;
 - b. Penyediaan Sarana pendukung Operasional PKB/PLKB;
 - c. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
 - d. Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - e. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP;
 - f. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
 - g. Peningkatan Kopetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - h. Dukungan Operasional Pelayanan KB bergerak;
 - i. Peningkatan Kesertaan KB Pria;
 - j. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.
- 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - b. Orientasi /Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - c. Penyediaan Biaya Operasional Bagi kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - d. Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS);
 - e. Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program

- Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- f. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2023. Penyusunan Renja Tahun 2023 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tahun 2023.

Dokumen perencanaan tahun 2023 utamnya RKPD 2023 yang menjadi pedoman penyusunan Renja PD 2023 sangat pengaruh oleh dampak Pandemi *Covid-19*. Hal tersebut mengakibatkan bergesernya beberapa capaian indikator dan menurunnya tingkat pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Akibatnya ada beberapa kegiatan yang harus dikurangi volumenya karena memang secara pelaksanaan memang sudah tidak memungkinkan lagi dan juga karena keterbatasan anggaran sehingga harus dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas. Untuk kegiatan yang ketersediaan anggaran belum mencukupi diperlukan inovasi dan kolaborasi antar bidang supaya output kegiatan tetap tercapai. Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang mempunyai output untuk menyusun dokumen perencanaan dan kelitbangan mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan Pembangunan di Kabupaten Wonogiri, sehingga program dan kegiatan di Dinas PPKB dan P3A yang sudah disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 diharapkan tetap bisa berjalan dengan optimal. Untuk itu dalam penyusunan RKA, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban perlu dilakukan pengendalian secara intensif dan terus menerus melalui koordinasi, SPIP dan pengawasan.

Perubahan berbagai ketentuan perencanaan pembangunan sangat sulit diprediksi, sehingga pelaksanaan Renja pada Dinas PPKB dan P3A tahun 2023 ini bisa saja berubah, namun secara prinsip seluruh yang tertuang dalam Renja ini merupakan hasil kajian terhadap seluruh kebutuhan program dan kegiatan, perubahan yang terjadi tetap dalam upaya pencapaian sasaran *Renja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2023*

utama penyediaan dokumen perencanaan pembangunan dan kelitbangan, sehingga diharapkan seluruh unsur Dinas PPKB dan P3A tetap selalu menjadikan Renja ini sebagai pedoman utama pembangunan tahun 2023.

Wonogiri, November 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PEMBINAAN DAN PENGINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI



MUDAROK, SKM, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19690212 199003 1 010